

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

**PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ETIKA BERLALU LINTAS DALAM
MATA PELAJARAN PPKN DI SMP PERCONTOHAN PENDIDIKAN ETIKA
LALU LINTAS KOTA YOGYAKARTA**

Disusun oleh:

Fitri Dwi Astuti
NIM 13401241067

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dilaksanakan Ujian Akhir Tugas Akhir Skripsi bagi yang
bersangkutan.

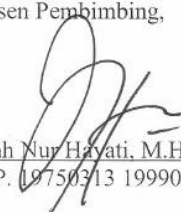


Yogyakarta, 17 November 2017

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Mukhamad Mardiono, M.Pd.
NIP. 19780630 200312 1 002

Disetujui,
Dosen Pembimbing,


Iffah Nur Hayati, M.Hum.
NIP. 19750313 199903 2 001

PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ETIKA BERLALU LINTAS DALAM MATA PELAJARAN PPKn DI SMP PERCONTOHAN PENDIDIKAN ETIKA LALU LINTAS KOTA YOGYAKARTA

THE INTEGRATION OF TRAFFIC ETHIC EDUCATION IN PPKn SUBJECT OF TRAFFICT EDUCATION JUNIOR HIGH SCHOOL MODEL IN YOGYAKARTA

Fitri Dwi Astuti dan Iffah Nur Hayati, M.Hum

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

13401241067@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran PPKn dan mendeskripsikan kendala dalam pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas pada mata pelajaran PPKn di SMP Percontohan Pendidikan Etika Lalu Lintas Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas ke dalam mata pelajaran PPKn dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang berintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan lalu lintas berupa kedisiplinan dan tanggungjawab. 2) kendala pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran PPKn adalah: kesulitan dalam pengembangan materi pokok pengintegrasian pendidikan lalu lintas dan kesulitan dalam melakukan penilaian sikap sosial yang berintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan lalu lintas.

Kata Kunci: Pengintegrasian, Pendidikan Etika Lalu Lintas, PPKn.

ABSTRACT

The aims of the study are to describe the integration of traffic ethic education in PPKn subject and the obstacles in the integration process of traffic ethic education in PPKn subject at Traffic Education Junior High School Model in Yogyakarta. This study is a descriptive study using the application of qualitative approach. The subject of the study is determined by purposive technic. To collection the data research conducts by interview, documentation, and observation technic. The validation of the data uses triangulation method. The analysis of the data applying inductive technic which includes some stages as data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The result of the study shows that: 1) the integration of traffic ethic education in PPKn subject covers the planning process and implementation of PPKn Learning which is integrated with the values of discipline and responsibility in traffic education. 2) the obstacles in the integration of traffic ethic education in PPKn subject are: difficulty in developing the substance of traffic education and in doing the social attitude assessment which is integrated with traffic education values.

Keywords: The integration, Traffic ethic education, PPKn.

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan dewasa ini memunculkan beberapa permasalahan. Permasalahan lalu lintas merupakan masalah yang secara umum berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Banyaknya pelanggaran terhadap norma berlalu lintas di Indonesia saat ini menjadi indikator buruknya perilaku berlalu lintas.

Fenomena pelanggaran lalu lintas ditunjukkan oleh perilaku berlalu lintas yang mengabaikan etika berkendara serta aturan hukum. Perilaku buruk dalam berkendara tersebut berpengaruh pada banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, sebab tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas menjadi persoalan yang mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia. Menurut UU Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 24 berbunyi, “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga, tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda”. Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas merupakan persoalan yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi masalah umum di kota besar maupun kota kecil di seluruh Indonesia.

Selain itu, menurut Rahardjo dan Sakti (2011: 67) bahwa meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat telah mengakibatkan berbagai kesulitan, selain dari pada timbulnya kecelakaan yang semakin meningkat. Lebih lanjut untuk data dampak

kecelakaan lalu lintas di kota Yogyakarta dari tahun 2015 hingga 2016 yang mengalami peningkatan. Adanya peningkatan angka kecelakaan di kota Yogyakarta pada tahun 2014 hingga 2016 memberikan dampak yang dialami oleh pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

Berikut tabel 2 menyajikan mengenai dampak kecelakaan lalu lintas di kota Yogyakarta pada tahun 2014-2016 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Dampak Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2014-2016

No	Dampak Kecelakaan	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Mati/Meninggal	37	45	47
2.	Luka Berat	2	0	0
3.	Luka Ringan	680	899	830
4.	Kerugian material	644.650	559.861	582.200
5.	Jumlah Kecelakaan	495	651	616

Sumber: <https://yogyakarta.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017 pukul 13.30 WIB

Dari total kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dipaparkan di atas, terjadi peningkatan yang signifikan dari 495 kasus menjadi 651 kasus pada tahun 2014-2015 sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 2,7 % di kota Yogyakarta. Kemudian untuk jumlah korban meninggal dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan dari 37 korban menjadi 45 korban dan pada tahun 2016 sebesar 47 korban. Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa meskipun jumlah angka kecelakaan lalu lintas di kota Yogyakarta pada tahun 2016 mengalami penurunan akan tetapi dari keempat dampak kecelakaan lalu lintas pada tabel 1 diatas untuk jumlah pelaku/korban meninggal dunia dari tahun

2014 hingga 2016 tetap mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Selain itu, untuk kelompok umur dari pelaku kecelakaan lalu lintas juga menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Banyak para remaja ataupun anak-anak tetap mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tanpa mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Akibatnya terjadi kasus kecelakaan lalu lintas, seperti kutipan dari berita online Liputan6.com (Jumat, 20 Januari 2017):

“Seorang pelajar SMP pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, Aldofan Agam, akhirnya mengembuskan napas terakhir pada Jumat pagi tadi, setelah empat hari dirawat di rumah sakit. Dofan tercatat sebagai siswa kelas IX SMP N 5 Yogyakarta. Tabrakan maut itu terjadi pada Minggu, 15 Januari 2017, kejadian tersebut berlokasi di dekat pom bensin Jalan Kaliurang Kilometer 11 Pedak, Sardonoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus kecelakaan tersebut berdampak pada meninggalnya 3 orang (diakses <http://regional.liputan6.com/read/2833138/tabrakan-di-sleman-motor-ninja-terbelah-2-pengendara-tewas>)”

Kasus di atas merupakan salah satu contoh kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja, khususnya pelajar SMP yang berdampak pada hilangnya nyawa seseorang. Menurut Putranto (2008: 135), terdapat hubungan signifikan antara usia dan tingkat pendidikan terhadap perilaku membahayakan dalam penggunaan sepeda motor, makin muda usia dan makin rendah tingkat pendidikan pengemudi sepeda motor makin tinggi kecenderungan untuk berperilaku membahayakan dalam penggunaan sepeda motor.

Jika banyak remaja melakukan pelanggaran lalu lintas yang berdampak pada kasus kecelakaan lalu lintas, hal ini dikarenakan faktor psikologis dan tingkat

pendidikannya. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelajar SMP melakukan pelanggaran. Pertama, ketidakdisiplinan yang dipengaruhi oleh faktor luar dimana siswa yang sudah mengetahui peraturan dari sekolah akan tetap melanggar tanpa takut sanksi-sanksi. Kedua, ketidaktahuan artinya banyaknya pelanggaran dilakukan siswa yang tidak mengetahui marka rambu lalu lintas sehingga mengendarai kendaraan dengan cara ugal-ugalan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan pada usia remaja yaitu pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui pendidikan etika lalu lintas sejak dini.

Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan lalu lintas sejak dini diperlukan sebagai upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas. Adapun dalam rangka mewujudkan budaya tertib berlalu lintas serta kepedulian terhadap permasalahan lalu lintas di kota Yogyakarta, maka pemerintah kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu lintas. Peraturan Walikota tersebut ditetapkan dengan mengingat peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas pada Satuan Pendidikan yang memiliki tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan etika lalu lintas untuk menumbuhkembangkan norma etika berlalu lintas bagi peserta didik melalui pengembangan pengetahuan dan pembiasaan etika berlalu lintas.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas merupakan bagian produk hukum untuk mendukung kebijakan pelaksanaan pendidikan etika lalu lintas pada satuan pendidikan. Selain itu, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas memiliki maksud sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam

melaksanakan pendidikan etika lalu lintas meliputi pengintegrasian dalam mata pelajaran, pengembangan diri, budaya satuan pendidikan dan pedoman penilaian etika berlalu lintas.

Kebijakan pelaksanaan pendidikan etika lalu lintas pada satuan pendidikan berlangsung di beberapa sekolah di kota Yogyakarta. Sekolah – sekolah tersebut dipilih berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan sebutan sebagai sekolah percontohan pendidikan etika berlalu lintas. Sekolah percontohan pendidikan etika berlalu lintas (PELL) merupakan sekolah yang dijadikan percontohan dalam menerapkan kurikulum pendidikan etika berlalu lintas. Pelaksanaan kebijakan pendidikan etika lalu lintas di beberapa sekolah percontohan di kota Yogyakarta secara umum masih muncul permasalahan salah satunya terkait dengan pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran yang menyatakan bahwa beberapa guru terbebani dengan pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas ke dalam mata pelajaran (Burhanudin, 2016).

Sementara mata pelajaran PPKn lebih tepat menjadi salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia terutama krisis multidimensional antara lain, pengendara yang tidak sopan/ugal-ugalan, kecelakaan yang terus meningkat, dll. Dengan demikian, secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai dan norma berlalu lintas. Hal tersebut sejalan dengan Ali (2007: 65) yang mengatakan bahwa pendidikan sebagai pengendalian sosial selain hukum dan hukum dipergunakan pada tingkat terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi mengatasi masalah. Oleh karena itu, pengendalian sosial yang

paling tepat adalah melalui sekolah. Sekolah memiliki peran yang sangat strategis untuk menanamkan nilai dan norma sehingga akan terlahir karakter yang baik.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran PPKn di SMP Percontohan Pendidikan Etika Lalu Lintas Kota Yogyakarta dan mengangkatnya ke dalam sebuah Tugas Akhir Skripsi dengan judul: “Pengintegrasian Pendidikan Etika Berlalu Lintas dalam Mata Pelajaran PPKn di SMP Percontohan Pendidikan Etika Lalu Lintas Kota Yogyakarta”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, maka penelitian diharapkan mampu mengungkapkan informasi yang ada berupa data deskriptif mengenai pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran PPKn di SMP percontohan pendidikan etika lalu lintas kota Yogyakarta.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu berupa teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang-orang yang mempunyai kewenangan, pengetahuan, pengalaman terlibat dalam pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas pada bidang mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PPKn) tingkat Sekolah Menengah Pertama percontohan pendidikan etika berlalu lintas di kota Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah guru PPKn kelas VII SMP Negeri 9 Yogyakarta dan SMP Negeri 14 Yogyakarta.

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur atau mendalam yang bersifat luwes. Dokumentasi dalam penelitian ini

menggunakan berbagai arsip Silabus mata pelajaran PPKn kelas VII, RPP PPKn kelas VII dan buku model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran (PPKn) SMP/Mts kelas VII (Kurikulum 2013). Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Peneliti bertindak sebagai pengamat independen untuk mengamati pelaksanaan pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas di dalam proses pembelajaran mata pelajaran PPKn dengan menggunakan lembar pengamatan sebagai acuan agar proses observasi tetap fokus dan tidak keluar dari konteks yang menjadi tujuan utama. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data, khususnya triangulasi teknik atau metode yang dilakukan dengan cara pengecekan balik derajat kepercayaan data hasil dari teknik pengambilan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi yang didapatkan dari subjek penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif yang merujuk pada analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 247-253), yang mencakup tiga langkah yaitu: *Data reduction* (Reduksi data), *Data display* (Penyajian data), dan *Conclusiondrawing/verification* (Verifikasi). Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini berupa pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran PPKn di SMP percontohan pendidikan etika lalu lintas kota Yogyakarta serta kendala yang dihadapi pada pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran PPKn di SMP percontohan pendidikan etika lalu lintas kota Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengintegrasian Pendidikan Etika Berlalu Lintas dalam Mata Pelajaran PPKn di SMP Percontohan Pendidikan Etika Lalu Lintas Kota Yogyakarta.

1. Tahap Perencanaan Pengintegrasian Pendidikan Etika Berlalu Lintas dalam Mata Pelajaran PPKn.

Tahap perencanaan dilaksanakan dengan memetakan bagian kompetensi dasar, penyusunan silabus dan penyusunan RPP yang berintegrasi dengan materi dan nilai-nilai pendidikan etika lalu lintas. Tahapan perencanaan dilakukan sebagai berikut:

a. Pemetaan Kompetensi Dasar (KD)

Pada tahap pemetaan guru melakukan dengan dua cara yaitu mencermati seluruh Kompetensi Dasar kemudian memilih KD tentang norma serta memadukan Kompetensi Dasar tentang norma dengan tema materi berupa rambu-rambu lalu lintas serta nilai disiplin dan nilai tanggungjawab. Langkah pemetaan yang dilakukan oleh guru tersebut sejalan dengan isi Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalu Lintas di kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengintegrasian pendidikan melakukan analisis pemetaan SK/KD dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

b. Penyusunan Silabus

Penyusunan silabus PPKn yang berintegrasi dengan pendidikan lalu lintas dilakukan dengan mencontoh dan merevisi beberapa bagian pada silabus yang dikembangkan sebelumnya. Adapun revisi yang dilakukan pada beberapa bagian dari silabus sebagai berikut.

1) Revisi indikator pencapaian kompetensi

Revisi indikator pencapaian kompetensi dilakukan dengan cara mengintegrasikan pendidikan lalu lintas ke beberapa indikator yang terdapat dalam silabus PPKn kelas VII semester 1. Indikator pencapaian kompetensi guru jabarkan dari KD 3.2 memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat

untuk mewujudkan keadilan serta KD 4.2 melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, revisi pada bagian indikator pencapaian kompetensi yang guru lakukan hanya berkaitan dengan materi tentang norma.

2) Revisi materi pembelajaran

Revisi dilakukan dengan menambah materi pendidikan lalu lintas dan nilai-nilai pendidikan lalu lintas. Penambahan materi tersebut guru lakukan pada komponen materi pembelajaran dalam silabus yang berkaitan dengan Kompetensi Dasar tentang norma. Materi pokok tersebut berupa pengertian norma, macam-macam norma, fungsi norma di masyarakat, serta sumber-sumber norma. Kemudian guru padukan materi norma tersebut dengan materi tentang lalu lintas berupa rambu-rambu lalu lintas (nilai disiplin) serta perilaku penyimpangan terhadap lalu lintas.

c. Pengembangan RPP

Guru melakukan tahap pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan cara merevisi beberapa komponen dalam memasukkan materi dan nilai-nilai pendidikan lalu lintas. Adapun revisi yang dilakukan pada beberapa komponen dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai berikut.

1) Revisi tujuan pembelajaran

Hasil analisis RPP menunjukkan bahwa dalam pengintegrasian pendidikan lalu lintas guru PPKn melakukan penambahan tujuan pembelajaran dari RPP sebelumnya dengan substansi yang merujuk ke materi pendidikan lalu lintas. Tujuan pembelajaran tersebut dikembangkan dari indikator pencapaian tentang upaya menjaga keamanan lingkungan di jalan raya berdasarkan semangat

persatuan dan kesatuan (nilai tanggungjawab) serta berpartisipasi aktif menciptakan ketertiban, kelancaran lingkungan di jalan raya (nilai disiplin). Kemudian indikator pencapaian kompetensi pembelajaran tersebut diturunkan ke beberapa tujuan yakni meliputi kompetensi pengetahuan dan ketrampilan.

2) Revisi metode/pendekatan pembelajaran

Pada analisis RPP terkait dengan komponen metode/pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn berupa pendekatan pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi. Pembelajaran berbasis masalah tersebut diterapkan oleh guru karena melatih peserta didik untuk lebih kritis dalam menanggapi berbagai persoalan yang ada dilingkungan sekitar seperti masalah pelanggaran lalu lintas.

3) Revisi langkah-langkah pembelajaran

Sehubungan dengan analisis RPP pada revisi langkah-langkah pembelajaran, guru melaksanakannya pada kegiatan inti dengan memadukan materi norma dengan materi pendidikan lalu lintas kemudian guru kembangkan menggunakan metode diskusi atau media video guna mengajarkan *knowledge* ke peserta didik terkait dengan pengintegrasian pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran PPKn.

4) Revisi materi pembelajaran

Guru melakukan revisi materi pembelajaran tentang norma pada RPP dengan menambah materi pendidikan etika lalu lintas. Ruang lingkup dari materi norma juga berkaitan dengan hukum dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat dan norma-norma dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut menjadi sangat relevan dan sesuai untuk diintegrasikan dengan pendidikan lalu lintas yang menjadi bagian dalam kesadaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan Pengintegrasian Pendidikan Etika Berlalu Lintas dalam Pembelajaran PPKn.

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran pengintegrasian pendidikan lalu lintas dilakukan dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Pengintegrasian pendidikan lalu lintas yang dilakukan oleh guru PPKn menyentuh tiga domain, yakni 1) domain ranah pengetahuan, 2) sikap dan perilaku (*afektif*), 3) keterampilan (*psikomotorik*). Ketiga domain ini harus diunggulkan dan tidak ada yang lebih direndahkan. Dengan domain kognitif, peserta didik diajarkan mengetahui definisi dan batasan-batasan dari lalu lintas. Domain afektif menjadikan peserta didik memahami dampak buruk atau akibat yang ditimbulkan dari lalu lintas. Sementara itu, dengan domain psikomotor peserta didik dapat menjalankan nilai dan prinsip lalu lintas yang pada akhirnya mampu memberikan kesadaran dalam mematuhi segala peraturan lalu lintas serta berani melaporkan segala bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Dengan mata pelajaran PPKn, guru akan mengkaji lalu lintas dari perspektif hukum positif dan moral. Oleh karena itu, proses pelaksanaan pengintegrasian pendidikan lalu lintas pada pembelajaran PPKn dilakukan pada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup dalam pembelajaran PPKn kelas VII semester 1 sebagai berikut.

a. Kegiatan Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan yang telah guru laksanakan dalam pembelajaran PPKn terlihat bahwa penekanannya pada sikap kejujuran, kedisiplinan maupun

tanggungjawab agar peserta didik terbiasa untuk patuh pada peraturan sekolah maupun peraturan lalu lintas di jalan raya.

b. Kegiatan inti

Pada pelaksanaan pembelajaran PPKn yang berintegrasi dengan pendidikan lalu lintas dalam kegiatan inti yang dilaksanakan oleh guru menggunakan metode diskusi dan media pembelajaran video. Pengintegrasian pendidikan lalu lintas tidak hanya memberikan ilmu melalui ceramah. Akan tetapi peserta didik harus mampu berfikir kritis dan kreatif terhadap permasalahan lalu lintas yang ditayangkan melalui video kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peserta didik harus mampu menganalisis dan mengkomunikasikan hasil temuan dari fenomena masalah lalu lintas seperti memberikan solusi terhadap kasus pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian peserta didik dapat mengambil manfaat positif dengan menerapkan nilai-nilai dari pendidikan lalu lintas berupa kedisiplinan, tanggungjawab, ketertiban dan kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan sekolah maupun masyarakat.

c. Kegiatan Penutup

Pada pelaksanaan pembelajaran PPKn yang berintegrasi dengan pendidikan lalu lintas dalam kegiatan penutup guru melakukan penilaian pembelajaran yang menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Dalam penilaian pembelajaran PPKn yang berintegrasi dengan pendidikan lalu lintas dilakukan tidak hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan psikomotorik. Adapun penilaian yang guru gunakan berupa teknik non tes dan tes.

Kendala Pengintegrasian Pendidikan Etika Berlalu Lintas dalam Mata Pelajaran PPKn di SMP Percontohan Pendidikan Etika Lalu Lintas Kota Yogyakarta

1. Kesulitan dalam pengembangan materi pokok pengintegrasian pendidikan lalu lintas

Kendala ini muncul dalam pengembangan materi pokok pengintegrasian pendidikan lalu lintas yaitu kedua guru yang berasal dari sekolah yang berbeda, sama-sama mengintegrasikan pendidikan etika lalu lintas pada materi tentang norma dan keadilan. Materi norma dianggap lebih mudah dan sangat sesuai untuk diintegrasikan dengan pendidikan lalu lintas yang menjadi bagian dari norma hukum, sehingga dalam mencermati dan memadukan kedua materi yaitu norma dan lalu lintas tidak mengalami kesulitan. Lain halnya dengan materi PPKn selain norma jika dilakukan pengintegrasian guru merasa kesulitan untuk memadukan kedua materi yang tidak saling terkait. Selain itu, jika pengintegrasian dilakukan pada materi selain norma maka guru dituntut untuk lebih cermat dalam memilih materi pendidikan lalu lintas yang sesuai untuk diintegrasikan, jika tidak maka berdampak pada penyampaian materi pokok mata pelajaran PPKn yang tidak tersampaikan karena terfokus pada materi lalu lintas

2. Kesulitan dalam melakukan penilaian sikap sosial yang berintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan lalu lintas.

Kendala ini muncul dalam melakukan penilaian sikap sosial yang berintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan lalu lintas. Pertama, sulit untuk mengukur seberapa besar keberhasilan pendidik menanamkan nilai-nilai pendidikan lalu lintas. Kedua, kriteria dari nilai-nilai pendidikan lalu lintas yang dirumuskan pada lembar penilaian sikap dalam pembelajaran PPKn cenderung ke penanaman pendidikan karakter secara umum. Karena tidak ada kriteria penilaian peserta didik yang guru rumuskan berintegrasi dengan perilaku berlalu lintas dengan mengacu pada indikator pencapaian kompetensi berupa

perilaku taat terhadap ketentuan atau norma-norma berlalu lintas dilingkungan sekitar (nilai disiplin).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengintegrasian pendidikan etika lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn di SMP percontohan pendidikan etika lalu lintas kota Yogyakarta, sebagai berikut.

1. Pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas ke dalam mata pelajaran PPKn dilakukan melalui: (a) perencanaan meliputi pemetaan KD, pengembangan silabus, pengembangan RPP dengan merevisi beberapa komponen untuk memasukkan materi dan nilai-nilai pendidikan lalu lintas; (b) pelaksanaan pembelajaran PPKn meliputi kegiatan pendahuluan., kegiatan inti dan kegiatan penutup yang berintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan lalu lintas berupa kedisiplinan dan tanggungjawab.
2. Kendala pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran PPKn adalah: (a) kesulitan dalam pengembangan materi pokok pengintegrasian pendidikan lalu lintas dan (b) kesulitan dalam melakukan penilaian sikap sosial yang berintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran PPKn di SMP percontohan pendidikan etika lalu lintas kota Yogyakarta, maka terdapat beberapa saran yang diberikan. Adapun saran tersebut sebagai berikut.

1. Bagi Guru, sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan

pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn.

- a. Guru meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dengan terus menambah informasi terbaru terkait dengan materi dan berita tentang lalu lintas.
 - b. Guru menggunakan alat peraga dan berbagai metode belajar agar peserta didik tidak jenuh dalam mengikuti pelajaran dan memudahkan siswa dalam memahami materi.
2. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
- a. Memiliki komitmen tinggi untuk mengkawal kegiatan pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas dalam mata pelajaran dengan cara memberikan pelatihan khusus melalui penataran ataupun workshop terhadap para guru PPKn tentang cara pengembangan silabus, penyusunan RPP, pengembangan materi, penilaian sikap sosial yang yang beintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan lalu lintas.
 - b. Melakukan monitoring terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn yang berintegrasi dengan pendidikan lalu lintas melalui pengawas sekolah, sehingga guru dalam melakukan pengintegrasian memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk melaksanakan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. & Sakti Adji Adisasmita. (2011). *Manajemen Transportasi Darat: Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Besar (Jakarta)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putranto, L.S. (2008). *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Macanan Jaya Gemerlang.
- Ali, Z. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Media Grafika.
- Burhanudin, A. (2016). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Etika Berlalu*

Lintas di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 3 Vol. V.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Pengembang Kurikulum. (2013). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Etika Berlalu Lintas Pada SMP dan SMA/SMK*.
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas pada Satuan Pendidikan.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pendidikan Etika Berlalulintas di Kota Yogyakarta.
- BPS D.I. Yogyakarta. 2015. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka/ *In Figures* 2015. https://yogyakarta.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Dalam-Angka-2015.pdf. Diakses pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 17.30 WIB.
- . 2016. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016. https://yogyakarta.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Provinsi-Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Dalam-Angka-2016.pdf. Diakses pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 17.30 WIB.
- . 2017 .Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2017. https://yogyakarta.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Provinsi-Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Dalam-Angka-2017.pdf. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017 13.30 WIB.
- Liputan6.com.2017. <http://regional.liputan6.com/read/283313>

8/tabrakan-di-sleman-motor-ninja-
terbelah-2-pengendara-tewas